

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UU NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN KERINCI**

**Artikel**

**OLEH:  
TIARA RELLY AIZA  
NPM. 1010013311016**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2014**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UU NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN KERINCI**

**Tiara Relly Aiza<sup>1</sup>, Pebriyenni<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Civic Education, Department Of Social Study

Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E\_mail: tiarareilly@gmail.com

**Abstract**

The background of this research is the lack of participation and involvement of the community in the handling of waste management, the general public still littering sebarangan and in general in terms of waste management still rely on the activities of the government. This study aims to: 1). To describe community participation in waste management. 2). To describe the challenges and solutions that affect community participation in waste management. 3). To describe the government's policy in raising public awareness of waste management. This type of research is descriptive. Instruments used are observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results of this study demonstrate community participation in waste management is not maximized, the public in general still littering, is due to a lack of public awareness and understanding of the rules, laws and regulation on waste management. Constraints affecting community participation in waste management is the lack of a level of service, which is responsible institutional, operational and technical community participation in waste management, while the solution is the issuance of regulations, laws and regulation and improve service quality cangkupan adequate waste management. The government's policy in raising awareness of waste management by reducing waste generation as much as possible and also to socialize / counseling to the middle of the community about waste management.

**Keywords: Protection, Environment, Waste Management**

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup ini semakin berkembang dan sudah menjadi isu global. Berbagai macam kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menimpa manusia di berbagai belahan bumi, diantaranya persoalan sampah, pencemaran air, kerusakan hutan, banjir, polusi, tanah longsor dan sebagainya. Jika hal ini terus dibiarkan maka keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang semakin terancam.

Indonesia yang dikenal sebagai Nusantara adalah wilayah yang beraneka jenis kondisi lingkungan dan penghuninya yang beragam. Keadaan alam di Indonesia pada saat ini mengalami banyak perubahan lingkungan, banyak musibah seperti banjir, tanah longsor, dan satwa yang menyerang manusia. Jika dibandingkan lingkungan sekarang dengan keadaan lingkungan pada masa yang lalu, terjadi perbedaan yang sangat menonjol.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa:

1. Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini sangat diperlukan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang biak.

Di dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 yang dimaksudkan bahwa:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pemanfaatan,

- pengendalin, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban, peran dan partisipasi yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Terkadang program pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang kurang berhasil dipicu dari kurangnya bimbingan, penyuluhan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat tentang arti pentingnya kelestareian lingkungan hidup.

Menurut Mikkelsen (dalam Isbandi, 2008:228) mengartikan “Partisipasi adalah ketelibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri”.

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2008:230) adalah:

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dalam potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan di Kabupaten Kerinci belum maksimal, masyarakat umumnya masih juga membuang sampah sebarangan dan secara umum dalam hal pengelolaan persampahan masih mengandalkan kegiatan dari pemerintah baik penyediaan sarana dan prasarana maupun perawatannya. Jadi mulai dari pewadahan, pengumpulan/penyapuan, pengangkutan dan diakhiri di TPA di Kecamatan Danau Kerinci cangkupan layanan persampahan di Kabupaten Kerinci menjangkau di 12 kecamatan.

Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Kerinci kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi dikarenakan tidak disosialisasikan dan dilakukannya penyuluhan dengan baik ke tengah-tengah masyarakat oleh pemerintah yang berwenang mengenai pelaksanaan UU tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti menulis skripsi dengan judul:

**Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kerinci.**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci?

2. Bagaimanakah kendala dan solusi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci?

3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci?

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

3. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. menurut Zuriyah (2009:94), “deskriptif data yang diperoleh (berupa gambar kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi peneliti segera melakukan analisis data dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti, dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, maka peneliti mengambil sampel yang mewakili populasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* yang dilakukan secara mempertimbangkan sampel yang akan di ambil, dengan mengambil dua Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Siulak,

kemudian dari dua Kecamatan tersebut diambil satu Desa dari setiap Kecamatan. (Sugiyono, 2012:120).

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang membuang sampah yaitu 10% dari jumlah populasi sebanyak KK masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Observasi

Observasi dilakukan pada awal penelitian, observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

### 2. Angket (Kuesioner)

Angket akan diberikan kepada masyarakat yang berada di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci sebanyak 40 responden dan Masyarakat Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak sebanyak 40 responden dengan jumlah semua responden masyarakat sebanyak 80 responden.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari Badan Lingkungan Hidup bagian kebersihan dalam keterlibatannya dalam penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam bentuk foto sewaktu pengisian angket oleh masyarakat Desa Pendung Talang Genting dan Desa Pasar Siulak Gedang dan juga proses wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan di Badan Lingkungan Hidup yang dimasukkan untuk melengkapi dan sebagai bukti data lapangan pada saat observasi.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Juni – 22 Juni 2014 menunjukkan bahwa:

Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci belum maksimal, masyarakat umumnya masih juga membuang sampah sebarangan dan secara umum dalam hal pengelolaan persampahan masih mengandalkan kegiatan dari pemerintah baik penyediaan sarana dan prasarana maupun perawatannya.

Dari hasil observasi di atas di jelaskan bahwa untuk timbunan sampah kemudian dikumpulkan di tempat sampah dan ada juga yang mengumpulkan sampah di halaman rumah masing-masing. Setelah dikumpulkan, kemudian sampah yang diangkut dengan grobak pengangkut sampah, mobil dan motor pengangkutan sampah yang akan dibawa ke tempat penampungan akhir. Jadi mulai dari pewadahan, pengumpulan/penyapuan, pengangkutan dan diakhiri di TPA di Kecamatan Danau Kerinci dan cangkupan layanan persampahan di Kabupaten Kerinci menjangkau di 12 kecamatan. Tetapi bagi masyarakat tertentu ada juga yang melakukan pembuangan sampah pada tingkat akhir

dengan melakukan pembakaran, penimbunan dan ada juga yang melakukan pembuangan langsung ke sungai.

Selanjutnya mengenai kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan adanya tingkat dari pelayanan penanganan sampah. Hal ini disebabkan dengan timbulan sampah yang semakin meningkat terutama diakibatkan oleh penambahan penduduk maupun tingkat konsumtivitas (kebutuhan penduduk) yang semakin tinggi sementara tingkat pelayanan hingga saat ini masih belum optimal. Kemudian adanya kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan adanya jumlah personil yang terbatas dan belum memenuhi kebutuhan.

kemudian dengan adanya peran serta dari masyarakat hal ini lebih berupa pada partisipasi pasif (membayar retribusi pada kegiatan pasar pond (pasar mingguan) dan berlaku positif di lingkungannya dan juga dalam hal kegiatan pembinaan masyarakat yang sangat terbatas pada penyuluhan atau sosialisasi yang

bersifat isidentil (sewaktu-waktu). Kemudian adanya teknis operasional dalam penanganan sampah yang umumnya masih dilaksanakan secara konvensional melalui pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir.

Adapun solusi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan (UU dan Perda) yang mengatur tentang persampahan di Kabupaten Kerinci peraturan yang digunakan oleh pemerintah adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan telah di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudian dengan adanya komitmen dari pemerintah dalam upaya meningkatkan cangkupan dan kualitas pelayanan secara memadai dalam hal ini dilakukannya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terus meningkat, seperti melakukan penambahan mobil



angkutan sampah, personil atau petugas penanganan sampah, penyediaan TPS sesuai dengan kebutuhan dan upaya peningkatan kualitas TPA secara maksimal.

Dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat secara menyeluruh, dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi tersebut sebagian masyarakat akan mengetahui bahwa pengelolaan sampah akan berdampak pada masalah kesehatan lingkungan terutama pada generasi muda.

Selanjutnya dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah dengan dilakukannya pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya dalam hal kebijakan ini pemerintah melakukan strategi yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat mengenai hal peningkatan upaya penanganan sestim 3R dan penanganan sampah B3 rumah tangga secara maksimal dan juga

melakukan mekanisme dalam pemanfaatan sampah/3R. Kemudian dengan melakukan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah kebijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan ini adalah dengan cara meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada generasi muda dan ke tengah-tengah masyarakat umum.

Salah satunya meningkatkan jumlah pembinaan sekolah Adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan), dan mengharuskan setiap usaha/kegiatan untuk mengurus izin/rekomendasi lingkungan. kemudian dengan melakukan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah Strategi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan ini adalah, dengan mengoptimalkan sarana dan prasaran persampahan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pelayanan, meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan, melaksanakan rehabilitas TPA untuk mencegah pencemaran lingkungan dan sekaligus melakukan mekanisme untuk

pengelolaan lingkungan hidup kawasan di sekitar TPA.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci secara kontinyu melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, dunia usaha/kegiatan untuk meningkatkan kesadarannya dalam hal pengelolaan sampah, guna mewujudkan kesehatan lingkungan hidup yang lebih baik.
2. Sosialisasi/penyuluhan oleh Badan Lingkungan Hidup dilakukan di berbagai tempat seperti, di lingkup pemerintah, dunia usaha/kegiatan dan sekolah-sekolah serta langsung ke masyarakat umum.
3. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanannya dalam hal pengelolaan sampah dengan

menerbitkan atau mengeluarkan peraturan daerah.

4. Dengan diberlakukannya Perda, maka partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang ramah lingkungan merupakan keharusan di masa yang akan datang.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Hari Wasono. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pembangunan Pertamanan di Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*. BLHD Kabupaten Kerinci 2013  
<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
- Kerinci dalam Angka*. Kerinci 2012 : Badan Pusat Statistik.
- Moleong, Lexy, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah
- Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabet.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Bung  
Hatta.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008  
tentang Pengelolaan Sampah.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi*

Undang-Undang Dasar 1945

*Penelitian Sosial dan  
Pendidikan. Jakarta: Bumi  
Aksara.*

Yusrizal. 2008. *Sosiologi*. Padang: